BAB I DARI IRIAN BARAT KE IRIAN JAYA 1
- Pembentukan Provinsi Irian Barat 4
- Musyawarah Rakyat Satu 8
- Penentuan Pendapat Rakyat 9

BAB II KELAHIRAN IRIAN JAYA BARAT 13
- Wacana Lama Pemekaran 14
- Masa Transisi Pemerintahan 18

BAB III OTONOMI KHUSUS PAPUA 21
- Presiden Megawati Sahkan UU Otsus 24
- Hak Orang Asli Papua 25

BAB IV DI PUSARAN REAKTIVISASI 29
- Menjadi Sasaran Ancaman 34
- Diselamatkan Polisi 38
- Mengelabui Dengan Pura-Pura Pulang 42
- Respon Positif Ibu Megawati 45
- Kabar Gembira Instruksi Presiden 47
- Instruksi Presiden 27 Januari 2003 54
- Nasib Irian Jaya Tengah 60

BAB V MEREBUT LEGITIMASI KPU 65
- Irian Jaya Barat Digugat ke Mahkamah Konstitusi 67
- Pengukuhan Penjabat Gubernur Irian Jaya Barat 73

BAB VI PALU HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI 77
- Tekanan Tidak Mereda 80
- Majelis Hakim Tak Utuh 84

BAB VII SIKAP POLITIK PRESIDEN 89
- Timbul Pudjianto Jadi Penjabat Gubernur 93
- Pidato Kenegaraan Presiden 97
- Dewan Berbalas Keputusan Politik 99

BAB VIII DIPANGGIL WAPRES JUSUF KALLA 105
- Klarifikasi Konsultasi Publik MRP 106
- Pertemuan Segitiga Batal 113
- Irian Jaya Barat Menunggu Nasib 116

BAB IX PILKADA SEBELAS MARET 119
- Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi? 120
- Abraham-Katjong Terpilih 122

BAB X OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT 125
- Empat Poin Pertemuan Biak 128
- Menjadi Provinsi Papua Barat 130
- Payung Hukum Papua Barat 132

BAB XI KEWENANGAN MEMILIH GUBERNUR 135
- Pemilihan Tak Langsung Demokratis 138
- Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan 142

BAB XII SYARAT ORANG ASLI PAPUA 145
- Majelis Rakyat Papua Barat 149
- Memaksakan Penetapan Calon 152
- Berakhir di Mahkamah Konstitusi 158
- Abraham-Katjong Periode Kedua 163

BAB XIII PEMEKARAN SEBAGAI SOLUSI 169
- Bukan Kesalahan Kebijakan Pemekaran 171
- Pemekaran Kian Diperketat 175

BAB XIV DARI AFDELING SAMPAI DESARTADA 181
- Beberapa Gagasan Format Pemekaran 184
- Pembentukan Daerah Mengandung Kewajiban .. 187

BAB XV REKAMAN DATA CAPAIAN 191
- Angka Statistik Dulu dan Kini 192
- Keadaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).. 196
- Perkembangan Prasarana Transportasi 198

BAB XVI MENANTI LAHIRNYA PROVINSI SORONG RAYA 201
- Dukungan Mengalir Luas 204
- Mengapa Provinsi Sorong Raya? 209
- DPR Tak Mengenal Pengambilalihan Tugas 210

BAB XVII CATATAN PENUTUP 213